



PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA



**PUSAT PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN UMUM
DAN KHUSUS**

RENCANA STRATEGIS

Tahun 2020-2024

DAFTAR ISI

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Kondisi Umum
- 1.3. Potensi dan Permasalahan
 - 1.3.1 Potensi
 - 1.3.2 Permasalahan

BAB II Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategi Dan Tata Nilai

- 2.1. Visi
- 2.2. Misi
- 2.3. Tujuan Strategis
- 2.4. Sasaran Strategis
- 2.5. Tata Nilai

BAB III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

- 3.1. Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan Literasi untuk Kesejahteraan
 - 3.1.1 Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial
 - 3.1.2 Pembangunan dan Modernisasi Fasilitas Layanan Perpustakaan
- 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Perpustakaan
- 3.3. Kerangka Regulasi
- 3.4. Kerangka Kelembagaan

BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

- 4.1. Target Kinerja Sasaran Strategis
- 4.2. Target Kinerja Sasaran Program
- 4.3. Target Kinerja Sasaran Kegiatan
- 4.4. Kerangka Pendanaan

BAB V Penutup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka. Selanjutnya Pasal 4 menjelaskan bahwa perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses informasi dan pengetahuan, perpustakaan merupakan institusi layanan publik yang wajib memberikan layanan perpustakaan pada masyarakat. Sebagaimana pada Pasal 5 Undang-Undang tentang Perpustakaan, menjelaskan :

- 1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh layanan, memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
- 2) Masyarakat di daerah terpencil, terisolir atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus;
- 3) Masyarakat yang cacat atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing;

Kewajiban pemerintah atas ketersediaan perpustakaan di masyarakat diperjelas pada Pasal 7 Ayat 1 Butir c, menjelaskan bahwa pemerintah berkewajiban menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di tanah air. Selaras dengan amanat tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 12 Ayat 2 Butir q menyatakan bahwa perpustakaan masuk pada urusan wajib pemerintahan baik pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Loncatan peradaban dunia dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan disrupsi yang sangat kuat di seluruh sendi kehidupan masyarakat. Kondisi ini mengharuskan terjadinya persaingan kompetitif antar individu dan antar bangsa. Oleh sebab itu, masyarakat

berpengetahuan menjadi tolak ukur bagi suatu bangsa untuk dapat menjawab persaingan global dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kehadiran masyarakat berpengetahuan ini adalah suatu tatanan masyarakat yang memiliki budaya literasi.

Upaya membangun kualitas manusia budaya literasi perlu dijadikan menjadi fondasi yang kokoh bagi terwujudnya masyarakat berkualitas dan sejahtera. Literasi adalah bentuk *cognitive skill* memungkinkan manusia untuk mengidentifikasi, mengerti, memahami, dan mencipta yang diperoleh dari kegiatan membaca yang kemudian ditransformasikan dalam kegiatan-kegiatan yang produktif yang memberikan manfaat sosial, ekonomi dan kesejahteraan.

Perkembangan literasi masyarakat di Indonesia sangat bergantung kepada kegemaran membaca masyarakat. Berdasarkan Kajian Budaya Baca Masyarakat Indonesia tahun 2019 menunjukkan rata-rata tingkat kegemaran membaca sebesar 53,84 atau berada pada kategori sedang. Terdapat 5 provinsi yang memiliki rata-rata tingkat kegemaran membaca dalam peringkat tinggi yaitu (1) Provinsi D.I Yogyakarta, (2) Provinsi Jawa Timur, (3) Provinsi Jawa Tengah, (4) Provinsi Jawa Barat dan (5) Provinsi DKI Jakarta. Survey Kegemaran Membaca di 102 kabupaten/kota pada 34 provinsi melibatkan 12.240 responden dengan tiga parameter, yaitu: (1) Frekuensi membaca per minggu (kali); (2) Durasi/intensitas membaca dalam sehari (jam); (3) Banyaknya bacaan yang telah dibaca selama 3 bulan terakhir (judul). Dari ketiga parameter tersebut menunjukkan indeks kegemaran membaca masyarakat sebesar 53.84. Secara rata-rata nasional nilai tingkat kegemaran membaca ini cenderung meningkat setiap tahun, seiring dengan berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional RI dan juga Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui Dinas Perpustakaan.

Program dan kegiatan yang menunjang semakin membaiknya nilai tingkat kegemaran membaca, antara lain bantuan buku kepada Komunitas, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Sakit, ekstensifikasi layanan perpustakaan Melalui Mobil Perpustakaan Keliling, Motor Perpustakaan Keliling dan Pojok Baca Digital (POCADI) serta pemberdayaan masyarakat melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di pedesaan dan bantuan perpustakaan daerah terpencil, terluar serta perbatasan.

Perpustakaan sebagai *leading sector* pengembangan dan pembinaan

dan kegemaran membaca diamanatkan untuk menjalankan sejumlah program terkait dengan pengembangan budaya literasi. Berdasarkan data yang ada capaian pengembangan perpustakaan di Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup menggembirakan termasuk juga peningkatan akses jurnal elektronik setelah melakukan berbagai inovasi layanan berbasis teknologi informasi. Indonesia merupakan peringkat kedua terbanyak perpustakaan setelah negara India (323.605) dan capaian lainnya juga adalah Indonesia menjadi negara teratas dalam gerakan *open access journal* dunia (Natur International, 2018).

1.2 Kondisi Umum

Berdasarkan data sensus Perpustakaan Nasional RI tahun 2018, dapat dirangkum jumlah perpustakaan secara nasional, sebagai berikut:

Tabel 1.2.1. Jumlah Perpustakaan Secara Nasional

No.	Jenis Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan
		2018
1	Perpustakaan Umum	42.460
	a. Perpustakaan Umum Provinsi	34
	b. Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota	496
	c. Perpustakaan Umum Kecamatan	1.685
	d. Perpustakaan Umum Desa/Kelurahan	33.929
	e. Perpustakaan Komunitas	1.018
	f. Taman Bacaan	5.298
2	Perpustakaan khusus	6.552
3	Perpustakaan Sekolah/Madrasah	113.541
	a. SD/MI	76.063
	b. SMP/TS	19.995
	c. SMA/SMK/MA	17.483
4	Perpustakaan Perguruan Tinggi	2.057
Jumlah Total Perpustakaan		164.610

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah total perpustakaan secara nasional yaitu sebanyak 164.610 yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. 164.610 perpustakaan tersebut, terdiri dari 42.460 perpustakaan umum, 6.552 perpustakaan khusus, 113.541 perpustakaan sekolah/madrasah dan 2.057 perpustakaan perguruan tinggi. Jika dirinci berdasarkan pulau-pulau

besar di Indonesia, sebaran perpustakaan dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.2.1. Sebaran Perpustakaan di Indonesia

Sebanyak 47,89% dari jumlah perpustakaan berada di pulau Jawa, selanjutnya sebanyak 23,55% berada di Sumatera dan sebanyak 11,62% berada di Sulawesi. Selanjutnya, jika dihitung rasio ketersediaan perpustakaan umum secara nasional adalah 0,00017, artinya hanya terdapat 17 perpustakaan per 100.000 penduduk.

Dalam upaya mewujudkan perpustakaan yang berkualitas di seluruh pelosok negeri, adalah menjadi tanggung jawab Perpustakaan Nasional RI dan dalam pelaksanaannya menjadi tugas pokok Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus.

Pengembangan perpustakaan sudah dilakukan dengan berbagai usaha dan upaya oleh pemerintah. Upaya yang sudah dilakukan seperti terbitnya berbagai peraturan dan perundang-undangan di bidang perpustakaan, penguatan kelembagaan dan layanan perpustakaan yang sudah menjangkau sampai pada daerah terpencil serta lomba-lomba yang sudah dilakukan. Diharapkan dari hasil pengembangan perpustakaan dapat mengakses informasi dengan mudah dan terpenuhinya kebutuhan akan informasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hasil pengembangan perpustakaan sampai saat ini belum dapat mengembangkan semua jenis perpustakaan secara optimal, dalam rangka peningkatan kualitas dan kapasitas perpustakaan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sejahtera. Dalam rangka pengembangan perpustakaan, berikut upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah:

a. Standart Nasional Perpustakaan

Perkembangan lembaga perpustakaan ditinjau dari perspektif pengelolaan, penyelenggara dan manajemen perpustakaan dikaitkan dengan kualitas, (quality assurance), sebagian besar belum sesuai dengan standar nasional perpustakaan lihat tabel 1.2.2.

Tabel 1.2.2. Hasil Akreditasi Perpustakaan

No	Jenis Perpustakaan	Perpustakaan Terakreditasi	Jumlah Perpustakaan	%
1.	Perpustakaan Umum	311	42.460	0,73%
2.	Perpustakaan Khusus	172	6.552	2,63%

Sumber : Rencana Strategis Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, 2020

Pelaksanaan akreditasi perpustakaan umum dan khusus masih sangat minimal bila dibandingkan dengan jumlah semua jenis perpustakaan. Hasil yang terakreditasi Perpustakaan Umum Provinsi/ Kabupaten/ Kota sebanyak 311 unit dari 42.460 jumlah perpustakaan umum dan Perpustakaan Khusus sebanyak 172 unit dari 6.556 jumlah perpustakaan khusus.

b. Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan perpustakaan khusus dalam menunjang program lembaga induk perpustakaan menempati posisi strategis karena dalam perumusan kebijakan lembaga perpustakaan dapat memberi masukan berupa data dan informasi. Perpustakaan juga menunjang penelitian lembaga induk dan dapat menggalakan minat baca dilingkungan unit kerja. Namun sampai saat ini baru dapat berkembang sekitar 2% dari lembaga yang ada baik pemerintah maupun swasta. Berikut merupakan rekapitulasi bantuan perpustakaan umum dan khusus :

Tabel 1.2.3 Rekap bantuan perpustakaan umum tahun 2015-2019

No	Jenis Perpustakaan	Jumlah Bantuan
1.	Perpustakaan Dinas/Kab Kota	505
2.	Mobil Perpustakaan Keliling	264
3.	Perpustakaan 3T	40
4.	Perpustakaan Komunitas	841
5.	Karakter Bangsa	1499

6.	Perbatasan	20
7.	Transmigrasi	90
8.	Motor Keliling	80
9.	Transformasi Perpustakaan	483
10.	Perpustakaan Daerah Terpencil, Perbatasan, Transmigrasi dan Desa Pesisir	40
TOTAL		3862

Tabel 1.2.4 Rekap bantuan perpustakaan khusus tahun 2015-2019

No	Jenis Perpustakaan	Jumlah Bantuan
1.	Perpustakaan Lapas	156
2.	Perpustakaan Rumah Sakit	80
TOTAL		236

c. Program Pengembangan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Perpustakaan memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat, melalui penguatan budaya literasi guna mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif, dan berkarakter, yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024. Pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kementrian PPN telah menetapkan Penguatan Literasi Untuk Kesejahteraan sebagai kegiatan dalam Program Prioritas Nasional 1 tahun 2019, yaitu pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar. Perpustakaan dalam hal ini menjadi lembaga yang strategis untuk peningkatan literasi masyarakat guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses informasi sesuai dengan konteks kebutuhannya masing- masing, sejauh ini jumlah bantuan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial tahun 2018-2019 yang telah tersampaikan sebanyak 483 bantuan.

1.3 Potensi dan Permasalahan

1.3.1 Potensi

Masyarakat berpengetahuan atau masyarakat literat menjadi pondasi sosial yang sangat kokoh untuk mendorong proses transformasi masyarakat menuju kehidupan yang sejahtera serta mewujudkan masyarakat Indonesia

yang memiliki watak berkarakter dalam budaya. Bonus demografi Indonesia dan peningkatan jumlah pengguna internet di Indonesia yang melonjak sampai dengan 52% penduduk Indonesia menjadi permasalahan sendiri yang perlu dihadapi oleh Indonesia. Selain itu aksesibilitas masyarakat terhadap perpustakaan masih terkendala oleh faktor sebaran jumlah perpustakaan yang tidak merata serta faktor geografis, yang mengakibatkan kualitas layanan perpustakaan tidak bisa dilaksanakan secara optimal.

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa harus hadir sebagai sistem sosial yang inklusif di masyarakat yang dapat terjangkau secara terbuka, mudah, dan murah dengan basis teknologi informasi untuk peningkatan budaya literasi masyarakat.

Teknologi informasi dan komunikasi mempunyai pengaruh amat besar terhadap segala aspek kehidupan saat ini. Pesatnya kemajuan teknologi informasi membuka kesempatan baru bagi perpustakaan untuk mengembangkan koleksi dari format konvensional ke format digital, mengembangkan layanan *onsite* ke layanan *online*, atau secara kompleksitas pengelolaan perpustakaan dari perpustakaan konvensional ke perpustakaan digital. Hal ini selaras dengan amanat Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Pasal 14 Ayat 3 bahwa setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Implementasi *Revolusi Industry 4.0* di sejumlah negara maju yang mengutamakan peran masyarakat cerdas dengan inovasi dibidang teknologi sebagai ujung tombaknya. Isu *Revolusi Industry 4.0* berpengaruh sangat besar terhadap layanan publik dimana masyarakat lebih banyak menuntut kemudahan dan transparansi dalam pelayanan publik. Salah satu layanan publik yang banyak mengalami perubahan adalah perpustakaan. Konsep *smart library* akan sangat populer, segala benda teknologi yang ada di dalam perpustakaan akan terintegrasikan dengan teknologi. Mulai dari data keanggotaan, hingga data koleksi yang akan bekerja secara pintar. Salah satunya dengan menggunakan *big data analytics* dan kecerdasan buatan. Konsep *smart library* akan banyak diadopsi saat ini. Peran manusia pun di bidang perpustakaan semakin minim dan tergantikan dengan teknologi. Pada masa depan koleksi digital akan lebih banyak dibanding koleksi tercetak, kecerdasan buatan kan menggantikan peran dalam layanan.

Perpustakaan sangat berpotensi besar untuk berintegrasi dengan isu *Revolusi Industry 4.0* Perpustakaan Nasional RI sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam sadar betul mengenai potensi besar yang bisa dimanfaatkan sebagai inovasi dalam menyambut isu *Society 5.0* di bidang perpustakaan.

Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus berkewajiban untuk melakukan pembinaan dengan melakukan pengembangan perpustakaan melalui:

a. Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus Berstandar Nasional

Saat ini jumlah perpustakaan di Indonesia 164.610 perpustakaan, dimana hanya 2% yang terakreditasi dan 98% perpustakaan belum terakreditasi, sehingga masih banyak perpustakaan yang belum sesuai standar nasional. Standar nasional perpustakaan saat ini mencakup; (1) koleksi perpustakaan; (2) sarana dan prasarana; (3) pelayanan perpustakaan; (4) tenaga perpustakaan; (5) penyelenggaraan perpustakaan; dan (6) pengelolaan perpustakaan.

b. Transformasi Layanan Berbasis Inklusi Sosial

Fungsi perpustakaan adalah sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa dan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat (*life long learning*), demokratis, berkeadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan. Selaras dengan amanah UNESCO SDGs 2015 tentang tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) menyebutkan sebagai berikut:



Gambar 1.3.1.1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan meliputi 17 butir berikut: 1) pengentasan kemiskinan; 2) tidak adanya kelaparan; 3) kesehatan dan kesejahteraan yang baik; 4) pendidikan berkualitas; 5) kesetaraan gender; 6) air bersih dan sanitasi; 7) energi bersih dan terjangkau; 8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; 9) industri, inovasi dan infrastruktur; 10) mengurangi kesenjangan; 11) kota dan komunitas berkelanjutan; 12) konsumsi dan produksi yang dapat dipertanggungjawabkan; 13) mengenai perubahan iklim; 14) pemeliharaan sumber daya laut; 15) pemeliharaan sumber daya darat; 16) kedamaian, keadilan dan lembaga yang efektif institusi yang kuat; 17) kerja sama global untuk mencapai tujuan. Program Pembangunan yang Berkelanjutan (SDG's) yang diamanahkan PBB sangat sesuai dengan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah sebuah program dimana perpustakaan bisa digunakan oleh siapa saja tanpa mengenal *gender*, agama, suku, ras.

Program ini mengembangkan fungsi perpustakaan menjadi ranah publik sebagai ruang untuk berbagi pengalaman, belajar kontekstual dan berlatih keterampilan hidup. Untuk mendukung program transformasi perpustakaan, kinerja layanan perpustakaan harus meningkat dengan meningkatkan kecukupan dan ketersediaan sumber daya perpustakaan dan layanan. Penyediaan sarana aksesibilitas dengan menyediakan infrastruktur internet/digital, kecepatan layanan perpustakaan juga harus dilakukan sehingga pemanfaatan koleksi bisa terlihat dan kunjungan pemustaka perkapita.

1.3.2 Permasalahan

Masyarakat semakin menyadari bahwa Indonesia memerlukan perpustakaan yang dapat mempermudah masyarakat mendapatkan bahan bacaan sehingga mampu menciptakan SDM yang handal/kreatif. Kesadaran ini diharapkan akan menumbuhkan sikap keberpihakan kepada dunia perpustakaan dan pada gilirannya memicu budaya baca dan literasi, maka *tantangan* utamanya antara lain:

- a. Menyediakan sumber bacaan bagi masyarakat yang sesuai dengan perkembangan zaman;
- b. Pendistribusian buku bacaan ke seluruh wilayah Indonesia hingga ke wilayah perbatasan, terpencil dan pulau terluar;
- c. Memperkecil rasio kepemilikan antara buku bacaan dan masyarakat;
- d. Kondisi di Indonesia saat ini adalah langka bahan bacaan dimana satu buku dibaca oleh 15 penduduk;
- e. Penguatan kapasitas kelembagaan perpustakaan;
- f. Penguatan lembaga akreditasi perpustakaan dan sertifikasi pustakawan;
- g. Peningkatan koordinasi dan kerjasama pusat, daerah, masyarakat, dan pihak swasta.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2019, saat ini jumlah penduduk Indonesia mencapai 268.074.600 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1,15% per tahun. Saat ini terdapat penduduk usia melek huruf di atas 15 tahun, sebesar 95.9%. Sementara itu, Produk Domestik Bruto sebesar 1.154 triliun rupiah, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,8% per tahun. Dari segi demografi, wilayah Indonesia lebih banyak didominasi oleh lautan dengan 17.504 pulau. Dari total 82.190 desa/kelurahan di Indonesia terdapat sejumlah 12.827 desa/kelurahan berada di tepi laut dan perairan.

Berdasarkan kondisi kependudukan di atas, perpustakaan memiliki prospek yang sangat menggembirakan untuk dikembangkan dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN TATA NILAI

2.1 Visi

Visi Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus Tahun 2020-2024 disesuaikan dengan Visi Perpustakaan Nasional periode 2020-2024, yaitu :

“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui penguatan budaya literasi”.

2.2 Misi

Misi Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus disesuaikan dengan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu agenda ke-4 yaitu ***revolusi mental dan pembangunan kebudayaan***. Maka Perpustakaan Nasional Republik Indonesia merumuskan Misi :

“Meningkatkan Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan, Pelayanan Prima Perpustakaan, dan Pelestarian Bahan Pustaka dan Naskah Nusantara”.

Misi Perpustakaan Nasional disesuaikan dengan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu agenda ke-4 revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Maka Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus merumuskan Misi: “Terwujudnya Perpustakaan Umum dan Khusus yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan dan Berbasis Inklusi Sosial untuk Memperkuat Budaya Literasi”, melalui:

1. Tersedianya kebijakan pembinaan dan pengembangan perpustakaan umum dan khusus;
2. Pembinaan dan pengembangan perpustakaan umum dan khusus;
3. Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

2.3 Tujuan Strategis

Upaya mewujudkan agenda pembangunan nasional maka tujuan pembangunan Perpustakaan Nasional RI 2020-2024 dalam rangka mewujudkan misi adalah:

“Penguatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas dengan pemanfaatan perpustakaan bagi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat, ditandai dengan meningkatnya nilai budaya literasi dari 55,03 (Baseline 2019) menjadi 71,0 tahun 2024”.

Tujuan perpustakaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 1 ayat (6) Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan jenis umur, kelamin, suku, ras, agama dan status social-ekonomi dan ayat (7) Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka dilingkungan Lembaga pemerintah, Lembaga masyarakat, Lembaga Pendidikan keagamaan, rumah ibadah atau organisasi lain.

Tujuan strategis Renstra Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Perpustakaan Umum :

Peningkatan kualitas pengembangan dan pembinaan perpustakaan umum sudah semakin marak dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat dan pemerintah. Terutama mendekatkan perpustakaan dengan masyarakat melalui perpustakaan komunitas, perpustakaan rumah pintar, perpustakaan bergerak dan pedesaan/kelurahan serta kecamatan. Melalui pengembangan tersebut diharapkan menjadi titik ungkit untuk penyediaan bahan bacaan/pengetahuan dan sekaligus pembudayaan gerakan membaca masyarakat. Eksistensi perpustakaan menjadi perhatian bagi penyelenggara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk ikut serta membangun sarana dan prasarana perpustakaan secara umum khususnya pemerintah. Desa sebagai titik ungkit pengembangan perpustakaan, karena Desa memiliki jumlah penduduk 70% dari 250 juta jiwa dan yang tersebar diseluruh wilayah NKRI. Modal sosial desa ini memiliki potensi sumber daya manusia yang sangat luar biasa untuk menggerakkan budaya baca dan tentunya peningkatan kualitasnya perlu ditingkatkan secara berkelanjutan melalui pemberdayaan perpustakaan dengan penyediaan

bahan bacaan sesuai kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Penuntasan sarana dan prasarana perpustakaan desa "satu desa satu perpustakaan" yang berkualitas, harus disertai dengan perluasan akses dan peningkatan mutu perpustakaan. Oleh karena itu penerapan Standar Nasional Perpustakaan (SNP) di desa menjadi sesuatu yang mutlak, dalam hal ini khususnya yang terkait dengan sarana prasarana dalam meningkatkan akses informasi berkualitas untuk menunjang program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.

Tabel 2.3.1. Perkembangan Perpustakaan Umum

NO.	JENIS PERPUSTAKAAN	JUMLAH PERPUSTAKAAN 2018
	Perpustakaan Umum	42.460
	a. Perpustakaan Provinsi	34
	b. Perpustakaan (Umum) Kabupaten/Kota.	496
	c. Perpustakaan (Umum) Kecamatan	1.685
	d. Perpustakaan (Umum) Desa/Kelurahan	33.929
	e. Perpustakaan Komunitas	1.018
	f. Taman Bacaan	5.298

Sumber: Renstra Perpunas 2020-2024

2. Pengembangan Perpustakaan Khusus

Peningkatan program sinergi yang telah dilakukan Perpustakaan Nasional terhadap Perpustakaan khusus diantaranya adalah pengembangan dan pemberdayaan perpustakaan dilingkungan K/L, yang telah dimulai tahun 2011- sampai dengan sekarang.

Tabel 2.3.2. Perkembangan Perpustakaan Khusus

NO.	JENIS PERPUSTAKAAN	JUMLAH PERPUSTAKAAN 2018
1	Perpustakaan Khusus	6.552

Sumber: Renstra Perpunas 2020-2024

2.4 Sasaran Strategis

Sasaran Strategis Perpustakaan Nasional RI 2020-2024 diformulasikan dari misi dan tujuan yaitu kondisi yang ingin dicapai dan diwujudkan oleh Perpustakaan Nasional RI sebagai *outcome* atau dampak, yaitu:

“Terwujudnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan literasi dan kegemaran membaca”, dengan indikator:

- a. Nilai kegemaran membaca dari 53,84 (Baseline 2019) menjadi 71,30 tahun 2024.
- b. Indeks pembangunan literasi masyarakat dari 10,2 (Baseline 2019) menjadi 15,00 tahun 2024.

2.5. Tata Nilai Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus

Sebagai landasan berfikir, bersikap, bertindak, dan pengambilan keputusan dalam upaya pencapaian visi dan misi yang ditetapkan, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan mengacu pada nilai-nilai organisasi Perpustakaan Nasional yang menganut nilai "**profesional, akuntabilitas, sinergi, transparan, dan integritas (PASTI)**":

- a. **Profesional**; bekerja maksimal dan bertanggung jawab sesuai dengan kapasitas, menjunjung tinggi kode etik profesi, terus mengembangkan potensi diri, mampu mengambil keputusan yang tepat secara mandiri maupun dalam tim.
- b. **Akuntabilitas**; pemanfaatan sumber daya perpustakaan yang dapat dipertanggung-jawabkan, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. **Sinergi**; komitmen membangun perpustakaan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan, dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
- d. **Transparan**; bersikap terbuka terhadap kinerja yang dihasilkan.
- e. **Integritas**; berkarya dan berbakti untuk organisasi dengan jujur, disiplin, penuh tanggung jawab dan dedikasi, menjunjung tinggi etika dan norma sosial, kesesuaian antara perkataan dan perbuatan, mengedepankan kepentingan publik dan organisasi di atas kepentingan pribadi ataupun golongan, dan menjunjung tinggi amanah.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Pembangunan perpustakaan agar lebih terarah dan terukur serta adanya kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang telah ditentukan, maka dirumuskan arah kebijakan dan strategi nasional pembangunan perpustakaan yang merupakan tuntutan pelaksanaan pembangunan bidang perpustakaan dalam kurun waktu jangka menengah, sebagai berikut:

3.1 Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan Literasi untuk Kesejahteraan

3.1.1. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan sebuah program inovasi baru di bidang perpustakaan telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini memberdayakan masyarakat untuk memanfaatkan potensi perpustakaan dan telah menunjukkan kesuksesan diberbagai daerah dengan berbagai kesaksian masyarakat.

Dengan kesuksesan transformasi berbasis inklusi sosial, pemerintah merevitalisasi perpustakaan desa sebagai pusat kegiatan masyarakat. Perwujudan keseriusan pemerintah dalam mengejar kesejahteraan masyarakat melalui perpustakaan telah ditetapkan diberbagai bentuk arah kebijakan strategis perpustakaan misalnya dalam dokumen perencanaan dan penganggaran baik lintas sektor maupun regional. Pembangunan infrastruktur dan suprastruktur perpustakaan menjadi skala prioritas pemerintah baik di pusat maupun daerah. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan perpustakaan untuk mendukung program transformasi berbasis inklusi sosial adalah

- a. Pengembangan transformasi pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial melalui:
 - 1) Pemerataan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial;
 - 2) Peningkatan akses literasi informasi terapan dan inklusif;
 - 3) Pendampingan masyarakat untuk literasi informasi;
 - 4) Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan jejaring perpustakaan dengan berbagai lembaga pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

3.1.2. Pembangunan dan Modernisasi Fasilitas Layanan Perpustakaan

Pembangunan infrastruktur perpustakaan menjadi suatu keharusan sebagai konsekuensi logis literasi sebagai program prioritas nasional. Dengan demikian sinergitas perencanaan antara pusat dan daerah selaras dan hanya dapat diwujudkan manakala perencanaan antara dokumen perencanaan nasional dan daerah dirumuskan dan dilaksanakan secara konsisten.

Diharapkan dengan adanya program kegiatan ini peranan Perpustakaan Nasional RI dalam memperkuat perpustakaan daerah semakin dirasakan manfaatnya sebagai pembina semua jenis perpustakaan di Indonesia. Dalam pengembangan perpustakaan di Indonesia, kegiatan ini harus memperhatikan enam aspek, yaitu aspek pengelolaan perpustakaan, penyelenggaraan perpustakaan, koleksi perpustakaan, layanan perpustakaan, sarana perpustakaan dan tenaga perpustakaan yang tertuang dalam Standar Nasional Perpustakaan yang merupakan hal yang sangat penting untuk dijadikan prioritas dalam pengembangan perpustakaan. Aspek-aspek tersebut menentukan keberhasilan suatu daerah dalam pengembangan perpustakaan di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Bagian Ketiga pasal 12 ayat (2) huruf q dijelaskan bahwa urusan pemerintahan di bidang perpustakaan pada semua jenjang pemerintahan di Indonesia menjadi urusan wajib non dasar. Sejalan dengan itu Perpustakaan Nasional RI di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) telah menetapkan kebijakan untuk memperkuat perpustakaan umum mulai dari Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan sampai ke tingkat Kelurahan/ Desa dengan melaksanakan program bantuan pengembangan perpustakaan melalui pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK).

Adapun kebijakan dalam Dana Alokasi Khusus tersebut adalah pembangunan fasilitas layanan perpustakaan, rehabilitasi fasilitas layanan perpustakaan, dan pengembangan koleksi perpustakaan. Menu dan kegiatan ini dituangkan dalam petunjuk operasional DAK FisikSub Bidang Perpustakaan yang akan menjadi landasan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Sub Bidang Perpustakaan.

Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Perpustakaan yang selanjutnya disebut DAK Fisik Sub Bidang Perpustakaan, adalah dana

yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan pengembangan layanan perpustakaan daerah yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional demi terwujudnya pelayanan perpustakaan yang optimal dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa Mendukung pemenuhan sarana dan prasarana dasar, yang mendukung pelayanan publik. Mendukung pemerataan pelayanan dan mendorong percepatan pembangunan di daerah yang memiliki karakteristik tertentu seperti daerah tertinggal, terluar, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi. Mendukung Tema prioritas nasional serta Arahan Bapak Presiden lainnya.

Untuk percepatan perpustakaan untuk kesejahteraan, pemerintah telah mendorong dan menggulirkan program diantaranya DAK perpustakaan. Program ini untuk mendukung kebijakan penguatan literasi untuk kesejahteraan. Tahun 2019 dialokasikan anggaran DAK Perpustakaan Daerah untuk perpustakaan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ Kota. DAK perpustakaan digunakan untuk mendukung kegiatan prioritas penguatan literasi untuk kesejahteraan, melalui kebijakan transformasi pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Program/Kegiatan ini untuk penguatan infrastruktur perpustakaan seperti pembangunan gedung layanan perpustakaan perpustakaan daerah, pengembangan koleksi, pengembangan sarana dan prasarana layanan perpustakaan dan pengembangan TIK.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Perpustakaan

Arah kebijakan dan strategi pengembangan perpustakaan dapat direalisasikan dengan melaksanakan *initiative strategic* sesuai dengan misi lembaga yang telah ditetapkan, sebagai berikut :

1. Mewujudkan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan, melalui:
 - a) Meningkatkan jumlah ketersediaan dan pemerataan perpustakaan di seluruh wilayah Indonesia

Langkah operasional yang dilakukan adalah: (1) fasilitasi pendirian berbagai jenis perpustakaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah 3T; (2). stimulan untuk pembangunan dan penguatan berbagai jenis perpustakaan di seluruh wilayah; (3). insentif pengembangan

perpustakaan bergerak menggunakan berbagai moda transportasi (mobil dan motor perpustakaan keliling) sesuai dengan karakter kewilayahan.

- b) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah: (1) menyempurnakan Standar Nasional Perpustakaan; (2) penyusunan panduan implementasi standar nasional perpustakaan; (3) pembinaan dan pengembangan perpustakaan umum dan perpustakaan khusus; (4) pengembangan fasilitas layanan Perpustakaan; (5) Fasilitasi dan penguatan lembaga perpustakaan di pusat dan daerah.

- 2. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan umum dan khusus;
 - a. Membangun ekosistem pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan umum dan khusus melalui kerjasama dengan stakeholder di bidang perpustakaan.
 - b. Meningkatkan jumlah dan sebaran tenaga perpustakaan yang memiliki kompetensi.

3.3. Kerangka Regulasi

Tugas, fungsi, dan kewenangan Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus berjalan dengan baik dengan dukungan regulasi yang kuat. Kerangka regulasi yang telah disusun antara lain adalah Peraturan Kepala sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan mengenai Standar Nasional Perpustakaan Umum dan Khusus.

Kerangka regulasi yang akan disusun pada tahun 2020-2024 antara lain adalah Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional tentang :

- 1. Grand Desain Pengembangan Perpustakaan Umum;
- 2. Grand Desain Pengembangan Perpustakaan Khusus;
- 3. Pedoman Literasi Untuk Kesejahteraan;

4. Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Perpustakaan Umum;
5. Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Perpustakaan Khusus.

3.4. Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Perpustakaan Nasional, diusulkan Rancangan Undang-Undang yang menjadi bidang tugas Perpustakaan Nasional maupun yang terkait dengan bidang tugas Perpustakaan Nasional untuk ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional Jangka Menengah Tahun 2020-2024.

Pelaksanaan pembangunan di bidang perpustakaan memerlukan dukungan kelembagaan yang kuat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Prioritas kegiatan penguatan kelembagaan tahun 2020-2024 antara lain melalui Penguatan kapasitas kelembagaan perpustakaan.

Disamping itu, dalam memperkuat pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Perpustakaan Nasional perlu didukung oleh regulasi yang memadai yang dapat diimplementasikan sampai unit perpustakaan terkecil di masyarakat, dalam bentuk Peraturan Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Undang- Undang dan Peraturan Perpustakaan Nasional. Rincian Peraturan Perundang- undangan bidang tugas perpustakaan adalah sebagai berikut :

1. Amandemen Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
2. Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nondepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian; dan
4. Peraturan Perpustakaan Nasional tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis

Target kinerja Sasaran Strategis yang telah ditetapkan Perpustakaan Nasional RI merupakan kondisi yang akan dicapai dan diharapkan membawa pengaruh atau dampak (*outcome/impact*) bagi pencapaian tujuan pembangunan perpustakaan yaitu penguatan budaya literasi di lihat dari Perspektif Pemangku Kepentingan (*Stakeholders Perspective*), dengan indikator keberhasilan sebagai berikut:

Tabel 4.1.1. Perspektif Pemangku Kepentingan (*Stakeholders Perspective*)

SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
SS: Terwujudnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	Nilai	55,3	59,3	63,3	67,3	71,3
	Kegemaran Membaca Masyarakat						
Masyarakat	Indeks	Indeks	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0
	Pembangunan Literasi Masyarakat						

4.2 Target Kinerja Sasaran Program

Target kinerja Sasaran Program yang telah ditetapkan Perpustakaan Nasional RI merupakan kondisi yang akan dicapai dan diharapkan dalam mendukung keberhasilan target kinerja sasaran strategis yang membawa pengaruh atau dampak (*outcome/impact*) dalam mewujudkan pembangunan literasi masyarakat dan kegemaran membaca di lihat dari **Customers Perspective** dengan indikator keberhasilan sebagai berikut:

Tabel 4.2.1 Target Kinerja Sasaran Strategis Program Perpustakaan dan Literasi
(Customers Perspective)

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
SP1: Terwujudnya Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan dan Berbasis Inklusi Sosial untuk Memperkuat Budaya Literasi	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Rasio	1:16	1:15	1:14	1:13	1:12
	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Rasio	1 : 20.000	1 : 19.000	1 : 18.000	1 : 17.000	1 : 16.000
	Persentase peningkatan perpustakaan sesuai standar	%	19,48	20,45	21,42	22,39	23,36
	Tingkat kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	%	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00

4.3 Target Kinerja Sasaran Kegiatan

Target kinerja Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan Perpustakaan Nasional RI merupakan kondisi yang akan dicapai dan diharapkan dalam mendukung keberhasilan target kinerja sasaran program baik program perpustakaan dan literasi (program teknis) dan program dukungan manajemen (program generic). Target kinerja Sasaran Kegiatan yang membawa pengaruh berupa *output/outcome* terhadap pencapaian sasaran program di lihat dari **Internal Process Perspective**, dengan indikator keberhasilan sebagai berikut :

Tabel 4.3.1 Target Kinerja Sasaran Kegiatan

SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
SK1: Pengembangan dan Pembinaan Semua Jenis Perpustakaan	Persentase perpustakaan umum yang dibina dan dikembangkan	%	3,77	3,77	3,53	4,29	4,06
	Persentase perpustakaan khusus yang dibina dan dikembangkan	%	3,05	3,05	5,34	7,02	9,92
	Masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial	Orang	54.000	54.000	37.500	45.000	45.000

4.4 Kerangka Pendanaan

Dalam memenuhi target kinerja Perpustakaan Nasional RI sesuai visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan dan program serta kegiatan, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai, Pendanaan pengembangan perpustakaan akan bersumber dari pemerintah (APBN dan DAK), Pendanaan Perpustakaan Nasional RI akan memanfaatkan sebesar-besarnya alokasi anggaran yang bersumber dari APBN untuk pengembangan perpustakaan di Indonesia dan untuk membangun budaya membaca masyarakat. Secara terinci kerangka pendanaan menurut program dan kegiatan sebagaimana Anak Lampiran 1.

Tabel 4.4.1 Alokasi Anggaran Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus

Kode	Program/Kegiatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
057.DM	Program Perpustakaan dan Literasi	256.847,5	420.402,4	555.151,3	608.555,8	658.826,9
4384-	Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus	122.871,4	235.139,2	282.717,8	303.124,9	325.160,4

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategi (Renstra) Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan. Renstra merupakan penjabaran dari RPJMN 2020-2024 dan juga pentahapan pembangunan nasional dari periode terakhir RPJP 2005-2025. Renstra disusun dengan masukan para pemangku kepentingan dalam rangka penguatan akuntabilitas Perpustakaan Nasional RI sesuai dengan rekomendasi hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah tahun 2019 serta mempedomani Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

Sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra ini merupakan perwujudan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024. Keselarasan Renstra Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus 2020-2024 dengan Renstra Perpustakaan Nasional RI 2020-2024 telah disesuaikan melalui metode *Balanced Scorecard* dengan empat perspektif, yakni; (i) *Stakeholders Perspective*; (ii) *Customers Perspective*; (iii) *Internal Process Perspective*. dan (iv) *Learning and Growth Perspective*.

Program perpustakaan dan literasi merupakan strategi dalam mewujudkan masyarakat berpengetahuan. Ditandai dengan meningkatnya nilai berbudaya literasi. Maka, dimensi pembangunan bidang perpustakaan dibangun dalam dua dimensi yaitu peningkatan kegemaran membaca masyarakat dan pembangunan literasi masyarakat. yang diukur melalui; (1) ketersediaan infrastruktur layanan perpustakaan yang cukup; (2) ketersediaan bahan bacaan yang berkualitas secara merata di seluruh wilayah Indonesia; (3) ekstensifikasi dan perluasan akses layanan perpustakaan di seluruh wilayah dalam upaya menjamin ketersediaan dan pemerataan koleksi bahan perpustakaan di semua jenis perpustakaan di seluruh wilayah Indonesia; (4) kampanye dan promosi perpustakaan dan keterlibatan masyarakat di perpustakaan. Melalui pengembangan dan pembinaan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran yang integratif, komprehensif, tematik dan spasial diharapkan akan terwujud pembangunan kualitas sumber daya manusia Indonesia serta perwujudan revolusi

mental dan pembangunan kebudayaan sehingga terbentuk masyarakat yang berpengetahuan, inovatif, kreatif dan berkarakter.

Apabila dikemudian hari diperlukan adanya perubahan Renstra Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus ini, maka akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan dan isu-isu strategis yang terkait dengan kebijakan kelembagaan dan pembangunan nasional.

LAMPIRAN

1. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN PUSAT PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN UMUM DAN KHUSUS

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	LOKASI	TARGET					SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
4384-Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus		Pusat							122.871,4	235.139,2	282.717,8	303.124,9	325.160,4	Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus
	01-Pengembangan dan Pembinaan Semua Jenis Perpustakaan													
	01-Prosentase Perpustakaan Umum yang Dibina dan Dikembangkan		3,77	3,77	3,53	4,29	4,06	Persen						
	02-Prosentase Perpustakaan KHusus yang Dibina dan Dikembangkan		3,05	3,05	5,34	7,02	9,92	Persen						
	03-Masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial		54.000	54.000	37.500	45.000	45.000	Orang						

2. MATRIKS PRIORITAS PUSAT PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN UMUM DAN KHUSUS

PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT / SUB OUTPUT	PN	MP	TARGET	SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)
4384- Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus	001-Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Umum	PN : 04-REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN PP : 04-PENINGKATAN BUDAYA LITERASI, INOVASI DAN KREATIVITAS BAGI TERWUJUDNYA MASYARAKAT BERPENGETAHUAN, DAN BERKARAKTER KP : 01-Peningkatan Budaya Literasi PPN : 03-Peningkatan akses dan kualitas perpustakaan berbasis inklusi sosial		2020 : 400 2021 : 400 2022 : 440 2023 : 484 2024 : 532	Perpustakaan	2020 : 122.871,4 2021 : 235.139,2 2022 : 282.717,8 2023 : 303.124,9 2024 : 325.160,4
	001-Tanpa Sub Output	PN : 04-REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN PP : 04-PENINGKATAN BUDAYA LITERASI, INOVASI DAN KREATIVITAS BAGI TERWUJUDNYA MASYARAKAT BERPENGETAHUAN, DAN BERKARAKTER KP : 01-Peningkatan Budaya Literasi PPN : 03-Peningkatan akses dan kualitas perpustakaan berbasis inklusi sosial				

	001-Tanpa Sub Output	PN : 04-REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN PP : 04-PENINGKATAN BUDAYA LITERASI, INOVASI DAN KREATIVITAS BAGI TERWUJUDNYA MASYARAKAT BERPENGETAHUAN, DAN BERKARAKTER KP : 01-Peningkatan Budaya Literasi PPN : 03-Peningkatan akses dan kualitas perpustakaan berbasis inklusi sosial				
--	----------------------	---	--	--	--	--